



## **India sebagai Mediator Global: Upaya *Multi-Alignment* dalam Mengatasi Resesi Global 2023**

Yosua Saut Marulitua Gultom

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; email: yosuagultom187@gmail.com

Finsy Aurelia Putri Kinanti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; email: finsyaurelia543@gmail.com

Syifa Aprilia Putri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; email: aprilsyifa@gmail.com

| Submit: 30-06-2023

| Accept: 23-01-2024

| Publish: 31-01-2024

### **Keywords**

*India,  
Multi-  
Alignment,  
Emerging  
Power, Global  
Recession 2023.*

### **ABSTRACT**

*This paper aims to describe and analyze India's centrality through its multi-alignment policy that seeks to relate well with countries from various blocs in multilateral forums to achieve its national interests to face the 2023 global recession. Using a descriptive qualitative method with literature study techniques, this paper tries to see India's efforts in implementing its multi-alignment policy, especially in international forums. This paper examines India's stance as a new power in mediating global problems. We argue that India is a new force in global governance that has strong significance. India's emergence as a new power is emphasized through India's strategic efforts in dealing with other countries. We review India's membership in international forums that demonstrate India's preference in the global order for its national interests. India's active role in BRICS, IBSA and IMF shows India's prestige as a new power in global politics in positioning India's interests. We suggest that India's centrality in international forums also needs to be further strengthened, especially against the challenges of the upcoming G20 presidency that faces the 2023 global recession. This paper concludes that India's multi-alignment policy is effective in achieving its national interests.*

### **Kata Kunci**

*India,  
Multi-Alignment,  
Emerging Power,  
Resesi Global 2023.*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sentralitas India melalui kebijakan *multi-alignment*-nya yang berusaha berhubungan baik dengan negara dari berbagai macam blok dalam forum multilateral untuk mencapai kepentingan nasionalnya demi menghadapi resesi global 2023. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur, tulisan ini mencoba melihat upaya India dalam mengimplementasikan kebijakan *multi-alignment*, khususnya pada forum internasional. Tulisan ini meninjau sikap India sebagai kekuatan baru dalam memediasi permasalahan global. Tulisan ini berpendapat bahwa India merupakan sebuah kekuatan baru dalam tata kelola global yang memiliki signifikansi yang kuat. Munculnya India sebagai kekuatan baru dipertegas melalui upaya strategis India dalam berhubungan dengan negara lain. Penulis meninjau keanggotaan India di forum-forum internasional yang menunjukkan preferensi India dalam tatanan global demi kepentingan nasionalnya. Peran aktif India di BRICS, IBSA dan IMF menunjukkan prestige India sebagai kekuatan baru di politik global dalam memposisikan kepentingan India. Adapun penulis menyarankan bahwa sentralitas India dalam forum internasional juga perlu lebih diperkuat, khususnya terhadap tantangan presidensi G20 mendatang yang berhadapan dengan resesi global 2023. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan *multi-alignment* India efektif untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

## PENDAHULUAN

Setelah abad ke 21, dunia dihebohkan dengan hadirnya beberapa resesi global seperti resesi 2008 dan resesi akibat COVID-19. Penurunan aktivitas ekonomi negara yang menyerang angka Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tidak sebentar, menjadikan resesi sebagai ancaman suatu negara. Menurut Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve System (2003), resesi merupakan penurunan yang signifikan serta berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi selama periode tertentu yang biasanya terjadi dalam banyak negara di seluruh dunia. Resesi ditandai dengan adanya penurunan tajam dalam produksi dan penjualan barang dan jasa, tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan investasi, dan kelebihan pasokan barang di pasar. Dalam resesi, aktivitas ekonomi terhambat, sehingga terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, dan bahkan terjadi kontraksi dalam ekonomi.

Salah satu fenomena krisis keuangan global terjadi pada tahun 2008 sampai 2009. Krisis keuangan global pada tahun 2008 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama yang memicu krisis ini adalah gelembung perumahan yang terjadi di Amerika Serikat. Gelembung perumahan terjadi karena pada saat itu banyak bank memberikan pinjaman kepada individu yang tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjaman dan pada akhirnya gagal membayar kreditnya. Hal ini menyebabkan harga rumah turun drastis, dan bank-bank yang memberikan kredit rumah menderita kerugian yang signifikan (Amadeo, 2022). Banyak bank yang gagal membayar utangnya dan memicu krisis keuangan global yang melanda seluruh dunia. Selain itu, beberapa faktor lainnya yang ikut memperburuk kondisi krisis ini adalah kegagalan pengawasan dan regulasi pemerintah serta praktik perbankan yang buruk dalam pembiayaan utang berlebihan dan penggunaan instrumen keuangan yang rumit dan berisiko. Pada akhirnya, krisis ini meluas ke seluruh dunia dan memicu resesi global yang sangat merugikan banyak negara dan masyarakat.

Resesi global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak telak yang multifaset.

Resesi global 2008 memberikan tantangan terhadap struktur internasional, seperti WTO dan IMF, yang mana kedua organisasi ini gagal menghadapi tantangan resesi global dibuktikan dengan sedikitnya respon mereka yang efektif. Kurangnya koordinasi politik dalam internasional dianggap menjadi penyebab kegagalan dua lembaga ini, yang mana justru diperankan oleh G20 dalam mengkoordinasikan respons internasional terhadap krisis (Zaring, 2010).

Krisis finansial membawa Amerika Serikat terjebak dalam masalah likuiditas yang menyeret banyak investor dan lembaga-lembaga keuangan. Tidak adanya kesanggupan untuk melakukan pencairan sekuritas terkait subprime mortgage dari Amerika Serikat ini menyebabkan semakin luasnya masalah likuiditas ke berbagai negara. Krisis finansial ini turut berimbas pada perbankan di kawasan Eropa karena adanya interkoneksi pada sistem keuangan global seperti bank-bank di Eropa yang termasuk ke dalam sekuritasasi sub-prime mortgage Amerika Serikat di mana ini membuat timbulnya kerugian besar seperti bagaimana bank-bank di Amerika Serikat. Terjadi snowball effect negatif akibat mengeringnya pinjaman antar bank dan adanya deleveraging serta penutupan jalur kredit yang memberhentikan pinjaman ekonomi (Szczepanski, 2019). Hal tersebut menyebabkan sektor keuangan di Eropa mengalami guncangan yang sangat beresiko.

Krisis ini pun membawa tekanan besar terhadap zona Euro dengan guncangan pada sektor keuangan dan melambungnya anggaran publik. Ekonomi di zona Euro pun menurun sebesar 2% di tahun 2008. Namun baiknya adalah, European Central Bank selaku lembaga berwenang yang mengendalikan Euro melakukan tindakan cepat dalam merespon krisis ini. ECB memberikan akses yang berkelanjutan ke likuiditas melalui adanya operasi refinancing dengan lebih sering demi meyakinkan para pelaku pasar yang terdampak krisis ini (Mongelli & Camba-Mendez, 2018). Dengan itu, kondisi likuiditas berimbang tetap terjaga selama periode pemeliharaan cadangan.

ECB juga telah berupaya menopang stabilitas Euro melalui pembelian obligasi pemerintah dan sekuritas lain sekaligus berupaya menghindari deflasi dengan menurunkan suku bunga. Namun, meski ECB telah melakukan segala hal yang mampu menyelamatkan Euro, dampaknya pun tetap tidak terhindarkan. Krisis ini membuat negara-negara di Eropa terkena dampak paling parah di mana resesi, setelah krisis, terjadi lebih parah dibanding dengan yang terjadi di Amerika Serikat (Tomczak, 2023).

Di Dunia Utara, terutama rezim neoliberal, mereka menginterpretasikan krisis dan langkah-langkah yang diambil dengan mengambil model kepemimpinan dari rezim politik yang liberaldemokratis. Kebijakan negara-negara Utara dalam menanggapi resesi global 2008 dapat diterjemahkan dengan pemberian kekuasaan yang luas kepada eksekutif untuk menyelesaikan krisis. Langkah-langkah tersebut dinyatakan penting untuk memastikan tindakan yang terarah dan temporal untuk mengembalikan kondisi ekonomi.

Meskipun negara-negara berkembang juga terkena dampak dalam bentuk pertumbuhan yang lebih rendah, peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, namun dampaknya berbeda-beda. Negara-negara kecil yang memiliki utang besar dan sangat bergantung pada ekonomi AS akan terkena dampak paling parah. Namun, banyak negara berkembang, mulai dari banyak negara di Afrika hingga pasar-pasar besar yang sedang berkembang seperti Brasil, Cina, dan India, terus tumbuh pada tingkat yang relatif kuat, sehingga dapat meredam dampaknya bagi negara-negara lain. Krisis keuangan 2008 telah terjadi pada saat banyak negara berkembang telah menikmati tahun-tahun pertumbuhan yang baik, dan hal ini bersamaan dengan perbaikan system makroekonomi yang lebih baik (banyak negara telah belajar pelajaran penting selama krisis finansial Asia pada 1997) sehingga telah menghasilkan ekonomi yang lebih kuat di negara berkembang dalam

menghadapi krisis finansial 2008 (Naudé, 2009).

Perbedaan dampak krisis pada tahun 2008 antara negara-negara utara yang maju maupun negara selatan yang masih berkembang juga terletak pada saling ketergantungan. negara-negara utara yang sistem keuangannya telah terintegrasi sedemikian rupa sehingga ketika terjadi krisis, khususnya pada salah satu ekonomi besar, maka guncangan ekonomi tersebut akan dengan mudah ditransmisikan kepada negara-negara utara lain yang saling terhubung. Sedangkan, negara selatan yang pada saat itu hubungan institusi keuangannya lebih lemah mendapat dampaknya ketika melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara utara (Imbs, 2010).

Dunia Selatan seperti G-77 telah menjadi suara utama dalam menyerukan tindakan yang lebih terpadu untuk mengatasi kemiskinan dunia dan Millennium Development Goals (MDG), pengupayaan perdagangan Selatan-Selatan yang saling menguntungkan dan kerja sama regional di antara ekonomi berkembang, dan menghindari ketergantungan dari negara maju. Respon dunia selatan menginginkan integrasi lebih dalam pada tata kelola ekonomi global melalui reformasi lembaga keuangan dan ekonomi internasional (Jessop, 2012).

Berikutnya, resesi global kembali terjadi terjadi di era COVID-19 yang dimulai pada kuartal pertama tahun 2020. Menurut OECD (2021), pandemi COVID-19 mengakibatkan lockdown di berbagai negara yang menghentikan segala aktivitas ekonomi termasuk produksi, sehingga mengakibatkan penurunan angka permintaan dan penjualan. Penurunan permintaan dan penjualan tersebut memicu kegagalan sistem pasokan dan demand yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Aktor state, seperti pemerintah dan lembaga keuangan, juga dirugikan dengan kemunculan resesi pada era COVID-19. Pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memberikan stimulus bagi masyarakat dan perusahaan yang

terdampak. Dana tersebut bersumber dari pengeluaran pemerintah dan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 diharapkan dapat meredakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, namun juga berdampak pada peningkatan utang pemerintah yang menjadi beban di masa depan. Selain pemerintah, lembaga keuangan juga dirugikan akibat resesi era COVID-19.

Dampak krisis akibat pandemi COVID-19 berbeda-beda di setiap negara, tetapi yang pasti adalah semua negara terkena dampaknya. Tanggapan tata kelola terhadap krisis ini sangat bervariasi, baik dalam hal karakter maupun keberhasilannya (Peters, 2021). Sebagai contoh, Australia dan Selandia Baru sukses dalam menangani pandemi COVID-19 karena respon kebijakan pemerintah yang berfokus pada solidaritas masyarakat dan faktor geografis yang terpencil juga membuat kedua negara lebih berani dalam menerapkan kebijakan penguatan di perbatasan (Mayangsari, 2020; Wardhani, 2020). Di Eropa, respon negara-negara seperti Rusia, Italia, dan Jerman terhadap COVID-19 cenderung berfokus pada permasalahan stabilitas politik dan penguatan sistem kesejahteraan (Pratiwi & Salamah, 2020; Susanto, 2020). Respon Rusia khususnya, bertujuan untuk menjadi pemimpin alternatif dalam penanganan pandemi secara global (Dharmaputra, 2020). Respon Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang memiliki sumber daya, baik itu ekonomi maupun sumber daya manusia yang melimpah, justru gagal dalam menangani pandemi yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya ketidaktahuan yang disengaja oleh pemerintahan Donald Trump (Wardhana, 2020). Di negara berkembang seperti Brazil, kegagalan dalam merespon krisis pandemi adalah karena adanya gejolak politik baik di tingkat nasional maupun lokal (Santoso, 2020). Adapun, negara seperti Ethiopia menjadi salah satu negara yang bergantung pada lanskap kerja sama dan bantuan internasional dalam penanganan pandemi (Puspitasari, 2020).

Respon yang berbeda-beda dari negara-negara dan kurangnya kerja sama internasional yang konkrit mengindikasikan adanya pergeseran pola hubungan internasional yang meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral (Syawfi, 2020). Sebagaimana kebangkitan Tiongkok pasca krisis finansial 2008 mendorong pergeseran dalam tatanan dunia (James, 2011), celah yang dimunculkan akibat COVID-19 dan kegagalan Amerika Serikat dalam merespon pandemi juga dapat dimanfaatkan oleh negara lain dalam menata kembali tatanan dunia saat ini.

Dunia kembali dihadapkan dengan ancaman resesi ekonomi akibat perang Ukraina-Rusia yang terjadi pada tahun 2022. Perang antara Ukraina dan Rusia yang terjadi pada awal tahun 2022 memicu ketegangan politik dan ketidakpastian di kawasan tersebut. Perang ini tidak hanya mempengaruhi Ukraina dan Rusia, tetapi juga negara-negara yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kedua pihak terkait. Dampak ekonomi dari perang ini sangat besar, terutama bagi Ukraina yang merupakan negara dengan kondisi bergantung pada sektor pertanian dan industri. Perang yang memanas membuat sektor pertanian di Ukraina mengalami kesulitan karena lahan-lahan pertanian dan infrastruktur rusak akibat konflik. Selain itu, sektor industri seperti manufaktur dan pertambangan juga terdampak karena terjadi penurunan permintaan dari pasar global.

India sebagai negara yang sedang menikmati pertumbuhannya, tidak luput dari dampak pandemi COVID-19. Justru, dampak pandemi akan lebih dirasakan oleh India dalam setiap sektor. Sektor UMKM misalnya yang berkontribusi pada 30% GDP India serta penyerapan 50% tenaga kerja. Sektor UMKM di India sangat terpuak akibat pandemi. Sharma dan Rai (2023) dalam laporan penelitiannya terhadap lebih dari 200 pengusaha UMKM menemukan bahwa terjadi pengurangan terhadap permintaan pasar (53%), gangguan pasokan suplai (36%), hingga pada jatuhnya bisnis-bisnis UMKM (29%).

Pada sektor finansial, lembaga pemeringkat Moody's merevisi sistem perbankan India

menjadi negatif dari yang sebelumnya stabil, mengutip gangguan dalam aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19 pada tahun 2020 di India dan penurunan kualitas aset. Dikatakan bahwa kualitas aset akan memburuk di seluruh korporasi, UMKM, serta segmen ritel yang menyebabkan tekanan pada profitabilitas dan modal bagi pemberi pinjaman. Menurut Moody's, tekanan di antara lembaga keuangan non-bank pemodal non-bank akan membatasi kapasitas mereka untuk meminjamkan, yang selanjutnya menghambat Pertumbuhan ekonomi India (Perwej, 2020).

Sektor-sektor lain seperti turisme, pendidikan, hingga agrikultur juga mengalami dampak yang signifikan (Gupta & Goplani, 2020; Jena, 2020; Jalpuria et al, 2021). Kebijakan *lockdown* yang secara terpaksa dilakukan oleh pemerintah India mendorong terjadinya permasalahan pada tataran domestik India secara meluas. Kerugian keseluruhan terhadap perekonomian dan sektor-sektor yang berbeda tergantung pada tingkat keparahan dan lamanya krisis. Di tengah pandemi virus corona dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, selain kerugian moneter, dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat besar dengan tantangan sosiologis dan psikologis yang besar. Kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sudah ada meningkat dengan dampak negatif yang besar terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, serta penyakit mental (Aneja & Ahuja, 2021).

Hal ini kemudian diperparah oleh kondisi perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022. India mengimpor 85% dari kebutuhan minyak mentahnya, yang harganya telah meningkat hampir 50% pada kuartal pertama tahun 2022 (Kurniawan, 2022). India juga merupakan importir terbesar minyak nabati, mengimpor hampir 60% dari kebutuhannya. Harga kelapa sawit, minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di India juga telah naik hingga 45% tahun ini. India kemudian melakukan diversifikasi sumber minyak nabati, salah satunya adalah minyak bunga matahari.

Namun, para pemasok minyak bunga matahari, yang mayoritas diproduksi Ukraina dan Rusia dalam jumlah besar telah terganggu akibat adanya perang ini (Mohammed, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa dua krisis yang terjadi saat ini, yakni pandemi COVID-19 yang diperparah oleh invasi Rusia membawa dampak buruk, khususnya bagi India. Maka dari itu, India tidak boleh diam saja melihat krisis yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi India.

Untuk menghadapi krisis, suatu negara perlu mengambil langkah strategis baik melalui kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri. India merupakan negara yang mengaplikasikan upaya strategis dalam mencapai kepentingan nasionalnya sejak kemerdekaan. Kebijakan luar negeri India pasca kemerdekaan berfokus pada upaya strategis melalui tatanan politik yang independen. Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India pertama begitu menekankan perlunya suara India sebagai negara berdaulat di arena internasional. Nehru menganggap bahwa suara India yang independen merupakan suatu keharusan (Chandra, 2008). Upayanya ini diwujudkan dengan gagasan 'non-aligned movement' (NAM) yang memposisikan India sebagai negara yang tidak memihak blok manapun. Kebijakan ini menunjukkan adanya netralitas India melalui hak untuk tidak terikat dalam pengaruh suatu blok. Di tengah persaingan dua kekuatan besar antara blok barat dan blok timur, NAM menjadi gagasan yang berhasil diadopsi oleh berbagai negara di Asia dan Afrika yang melihat bahwa sikap independen dalam politik internasional tidak akan menjadikan mereka sebagai bidak dalam persaingan dua kekuatan besar tersebut.

Dinamika global ini menyebabkan adanya pergeseran kebijakan luar negeri India dari yang sebelumnya bersifat non-alignment menjadi kebijakan yang merefleksikan multi-alignment. Perubahan arah kebijakan luar negeri India sendiri tentunya berkaitan dengan upaya mencapai kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Hall (2016) yang

menjelaskan bahwa ada empat tujuan yang ingin dicapai India dari kebijakan multi-alignment ini yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, memperbaiki keamanan nasional, mengatasi ancaman baik internal ataupun eksternal, dan meningkatkan status serta peran India sebagai leading power dalam arena internasional untuk mempromosikan nilai dan cita-cita politik dan sosial India. Sikap multi-alignment India dapat dilihat dari keterlibatannya dalam berbagai aliansi dan kerja sama multilateral seperti BRICS yang diekspektasikan mampu membantu India dalam mendorong perekonomian nasional melalui kerja sama dengan Rusia, China, Brazil dan Afrika Selatan. India pun memiliki intensi dalam memperbaiki hubungannya dengan China melalui BRICS (Delly & Pahlawan, 2016). Adapun keterlibatan India dalam QUAD yang diklaim sebagai upaya mengatasi potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik bersama dengan Amerika Serikat, Australia dan Jepang. Ini menunjukkan bagaimana India membangun keterlibatan dengan setiap kekuatan besar untuk mencapai kepentingannya.

Kebijakan multi-alignment India ini memiliki prospek yang dilihat dari potensi kerja sama untuk terhadap kepentingan nasional India. BRICS berhasil tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru dan diekspektasikan mampu menjadi seperti G7, bahkan pasca krisis finansial 2008, perekonomian negara-negara BRICS tetap tumbuh dan selamat dari keterpurukan. Kemampuan BRICS dalam bertahan dan melewati krisis finansial 2008 lalu membentuk ekspektasi bahwa resesi global 2023 juga mampu dilewati BRICS. Namun, kelemahannya adalah India dan negara BRICS lainnya harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk mengikuti arus kerja sama, sedangkan sistem politik yang berbeda dan ekonomi yang tidak saling melengkapi menjadi kendala bagi keberlangsungan BRICS (Priangani, 2015). Di sisi lain, keterlibatan India dalam QUAD menunjukkan sifat pragmatisme multi-alignment India untuk kepentingan nasionalnya.

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, khususnya melihat keaktoran India dalam politik internasional dan dampak pandemic terhadap India. India sebagai aktor global banyak dibahas dalam berbagai tulisan, salah satunya pada artikel yang berjudul “Is India A Great Power? Understanding Great Power Status in Contemporary International Relations” oleh Manjeet S. Pardesi (2015) menjelaskan India telah diakui sebagai negara Great Power karena berhasil memenuhi beberapa kriteria, seperti jalinan hubungan keamanan dan ekonomi dengan negara lain di luar kawasan, memiliki kemampuan mempromosikan sejumlah kepentingan kawasan dan luar kawasan, dan diakui oleh negara-negara Great Power lainnya yang aktif di kawasan dan di luar kawasan tersebut. Usaha yang telah dilakukan India membuahkan hasil serta membuktikan bahwa kekuatan dari negara tersebut mampu melampaui wilayah asalnya di Asia Selatan.

Pada artikel lainnya, “*India: the next superpower?: India's soft power: from potential to reality?*” oleh Nicolas Blarel (2012) menjelaskan adanya upaya pemerintah dalam mempromosikan citra baru dari India. Terlihat dari arus data investasi masuk yang menyentuh angka lebih dari 13 miliar dollar. India pasca liberalisasi mengalami peningkatan di sektor manufaktur untuk perusahaan internasional yang membuat jangka panjang investasi negara India. Secara kebetulan, perkembangan budaya India, seperti musik, film, makanan, gaya dan agama telah menarik perhatian warga dunia. Hal tersebut membuat negara India semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara lainnya. Selain itu, dengan adanya soft power, India dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonominya yang menjadi faktor penting dari kebangkitan profil India. Secara bersamaan, India harus mampu memelihara citra internasional yang bersifat positif ini, serta menuntut India untuk menjadi negara yang lebih adil dan menciptakan masyarakat yang lebih efisien.

Kilas balik ketika krisis melanda dunia termasuk India yang telah dimuat dalam tulisan

seperti dalam artikel yang berjudul “*Impact of the Global Financial Crisis on the Indian Economy*” oleh Jaiswal & Dubey (2021) dijelaskan bahwa India mengalami guncangan ekonomi akibat kejatuhan Lehman Brothers dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi India sebesar 3% dalam periode krisis finansial 2008. Krisis ini menyebabkan sektor industri dan pertanian India menurun drastis sekaligus menurunnya ekspor India bersamaan dengan defisit fiskal dan kurs valuta asing yang meningkat. Namun, India berhasil keluar dari kondisi tersebut berkat dikeluarkannya kebijakan moneter dan fiskal oleh pemerintah India dan bank sentral India yang berisi manajemen likuiditas dengan instrumen yang tepat hingga pembatasan arus modal asing.

Terakhir, penelitian yang berjudul “*Social Economic Impact Of Covid-19 Outbreak In India*” oleh Kumar et. al (2020), menjelaskan bahwa Covid-19 membawa India pada krisis di berbagai sektor terutama ekonomi. Sejak pemberlakuan lockdown, hampir semua kegiatan ekonomi di India terhenti dan angka inflasi naik dari angka 8,24% menjadi 23% pada bulan April 2020. Pengangguran pun meningkat hingga mencapai 30,9% di bulan yang sama dan berdampak signifikan terhadap masyarakat hingga pekerja migran. Krisis COVID-19 juga berdampak pada terganggunya ekspor-impor karena ketergantungan India terhadap produk impor dari China yang besar. Ada sekitar 72% perusahaan India yang ditempatkan di kota-kota di China yang merasakan bagaimana COVID-19 mengancam bisnis dan pasar mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tulisan ini merumuskan pertanyaan yaitu “Bagaimana peran India sebagai emerging power memosisikan dirinya sebagai mediator global dalam menghadapi resesi global 2023 melalui kebijakan multi-alignment-nya?”. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran India melalui kebijakan multi-alignment-nya sebagai upaya dalam berhubungan dengan berbagai pihak untuk menghadapi resesi global

2023. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan multi-alignment yang dilakukan oleh India sebagai kekuatan baru dalam lanskap politik internasional yang secara pragmatis dapat menjadi landasan kerja sama dalam menghadapi krisis global.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### ***Emerging Power***

Pasca Perang Dingin, diskursus tentang distribusi kekuasaan antar negara sering diajukan dalam perdebatan literatur Hubungan Internasional. Dalam kondisi politik dan ekonomi internasional yang berubah ini, istilah emerging power berkembang dalam studi hubungan internasional. Istilah ini seringkali dikonotasikan untuk negara berkembang. Namun penyamaan ini kurang tepat. Hal ini karena Emerging power adalah negara yang perilaku diplomatiknya bertujuan untuk mereformasi atau meninjau kembali tatanan dunia serta memiliki dukungan material untuk melakukan hal tersebut. Emerging power diidentifikasi sebagai seperangkat atribut material dan ideasional bersamaan dengan aktivisme perilaku politik tertentu yang bersifat reformis atau revisionis dalam tatanan dunia. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi memainkan peran kritis dalam kebangkitan sebuah negara sebagai emerging power. Sehingga dapat dikatakan bahwa emerging power adalah negara yang bertujuan untuk meningkatkan posisinya dalam distribusi dan akumulasi kekayaan global dan mengubahnya menjadi kekuatan politik (Fonseca, Paes & Cunha, 2016).

Emerging power pada saat ini muncul sebagai kekuatan baru dalam tata kelola global. Kemunculan kekuatan baru ini telah mengubah hubungan kekuasaan yang telah menopang tata kelola global, dengan perbedaan cara pandang ekonomi, politik, dan budaya dari kekuatan yang sudah mapan (great power). Terlebih lagi, pertumbuhan emerging power diperkirakan akan lebih kuat daripada di negara-negara maju. Sebagai akibat dari munculnya kekuatan-

kekuatan baru, preferensi negara-negara untuk memilih heterogenitas (multipolar) dalam sistem internasional. Heterogenitas ini juga diperkuat dengan preferensi emerging power yang cenderung berbeda dengan kekuatan yang sudah mapan mengenai aturan internasional menjadi membentuk tata Kelola baru yang bersifat kurang universal, kurang liberal, dan lebih terfragmentasi. Pembentukan BRICS dan IBSA merupakan contoh dari fragmentasi tersebut melalui pembentukan klub informal (Stephen, 2017).

Dampak emerging power terhadap tata kelola global bukanlah bahwa kekuatan baru akan melepaskan diri dari atau berusaha menggulingkan tatanan yang ada. Namun lebih kepada pencarian terhadap kerja sama multilateral yang saling bersaing dengan tujuan yang berbeda dan negara pemimpin yang berbeda, sehingga akan memecah lanskap kelembagaan dan mengarah pada bentuk baru rivalitas institusional geopolitik-ekonomi. Keberadaan emerging power dalam tata kelola global baru kemungkinan akan lebih beragam secara institusional dan bersifat polisentris (Stephen, 2017).

### **Multi-Alignment**

Alignment adalah konsep yang bernilai netral yang tidak mengkonotasikan kondisi tertentu apapun ke dalam hubungan antar negara. Alignment telah digunakan di masa lalu sebagai sinonim dengan konsep aliansi dengan implikasi bahwa alignment, seperti aliansi, secara inheren mengasumsikan karakteristik keamanan. Namun, terlepas dari penggunaan istilah yang cenderung menjadi sinonim, terdapat perbedaan antara alignment dan aliansi atas dasar etimologis. Istilah alignment berasal dari aligner dalam Bahasa Prancis lama (dan aligner dalam Bahasa Prancis modern) yang berasal dari 'to' + lignier 'to line', atau 'to range (things) into a line'. Hubungan antara kata benda dan kata kerja adalah 'alignment' dari kata kerja 'align'<sup>1</sup>, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi penyelarasan. Istilah

ini jika diambil dari terjemahan Non-Aligned Movement menjadi Gerakan Non Blok, yang mana istilah 'blok' ini dapat diartikan sebagai keberpihakan<sup>2</sup>. Studi tentang etimologi menunjukkan bahwa istilah-istilah ini mengarah pada pengertian bahwa 'alignment' adalah istilah yang lebih umum untuk merujuk pada hal-hal yang 'sejalan'/persetujuan' (Chidley, 2014). Chidley (2014) kemudian berpendapat bahwa ketika sistem global bergerak menuju multipolaritas, ditambah dengan kebutuhan mendesak akan kemitraan kooperatif untuk mengatasi tantangan global, konfigurasi inovatif dari keberpihakan internasional yang dibentuk oleh negara telah muncul sebagai tren yang dapat diidentifikasi pada abad ke-21 sebagai respons terhadap sistem internasional yang berkembang. Kecenderungan ini ditandai dengan partisipasi aktif dan meningkatnya pengaruh dari Global South.

Menghadapi multipolaritas dalam hubungan internasional dan ketidakmampuan struktur yang ada telah menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada pengelompokan plurilateral. Maka dari itu alignment diadopsi oleh negara menjadi multialignment. Multi-alignment ini hadir sebagai strategi negara dalam membentuk hubungan internasional untuk berhubungan dengan setiap kubu. Namun, pergeseran ini tetap bersifat ad hoc, pragmatis, dan sedikit demi sedikit. Selain itu, transisi ini tidaklah bersifat linier akan adanya arah yang pasti (Jaffrelot & Singh Sidhu, 2013).

Hall (2016) lebih lanjut berpendapat bahwa multi-alignment tidak berkembang dari sebuah rencana strategis negara yang terkandung dalam dokumen dalam mendefinisikan kebijakan luar negerinya; sebaliknya, itu adalah kompromi antara kepentingan dan preferensi yang dipersepsikan negara tersebut, yang mengandung prinsip tergantung pada masalah yang dihadapi. Multi-alignment digunakan sebagai sarana untuk mencapai apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional dan ideal sebuah negara dalam hubungan

<sup>1</sup> <http://www.etymonline.com/word/alignment>

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

internasional, seperti pembangunan ekonomi, keamanan nasional, dan mempromosikan nilai-nilai negara ke dalam sistem internasional sebagai pemimpin global. Multi-alignment ditandai dengan penekanan pada keterlibatan dalam lembaga multilateral regional, penggunaan kemitraan strategis, dan apa yang disebut sebagai 'normative hedging'. Keanggotaan organisasi memungkinkan elit pembuat kebijakan untuk terlibat dalam dialog yang lebih teratur dengan negara-negara besar dan negara-negara regional lainnya, menyediakan sarana untuk menilai niat dan (jika mungkin) membangun kepercayaan dan keyakinan dengan negara lain. Kemitraan strategis memberikan akses ke pasar, keuangan, teknologi, senjata, intelijen, dan komoditas lain yang tidak dimiliki saat ini dalam jumlah dan kualitas yang diinginkan. Kemudian, normative hedging memungkinkan negara untuk menghindari sengketa yang tidak perlu kepada kekuatan besar dengan preferensi normatif yang kuat dan menampilkan dirinya sebagai negara yang terbuka terhadap diplomasi.

## **METODE RISET**

Metode penelitian merupakan instrumen yang penting dalam penulisan ilmiah. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian studi literatur. Metode kualitatif dapat digunakan dalam memperoleh data secara mendalam, adapun data tersebut adalah data yang memuat makna (Sugiyono, 2013). Menggunakan metode kualitatif, penulis melakukan penelitian secara menyeluruh dan lebih mendalam terhadap suatu fenomena sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan dengan lebih komprehensif.

Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami persepsi sosial dari objek penelitian dan menelusuri makna yang terkandung di dalamnya (Berg & Lune, 2017). Sebagai penelitian kualitatif, tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena. Teknik studi literatur

terhadap data sekunder seperti buku, artikel ilmiah, maupun sumber internet digunakan untuk menunjang pemahaman mengenai pembahasan dalam tulisan ini.

Data yang didapatkan oleh penulis berdasarkan hasil analisis berbagai bahan bacaan seperti jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang merujuk pada judul tulisan penulis. Pada metode analisis, penulis mengumpulkan, mengurangi, menggambarkan, dan memverifikasi hasil temuan yang didapatkan secara jelas, lalu dituangkan pada tulisan secara jelas (Miles & Huberman, 1994). Tujuan dari metode tersebut adalah untuk menghasilkan interpretasi yang akurat dari data kualitatif yang dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Situasi di India Menghadapi Krisis Akibat Pandemi Covid-19**

Sebagai negara yang menyandang status emerging power di dunia yang multipolar, India dapat memanfaatkannya sebagai suatu peluang sekaligus menjadi tantangan terhadap kebijakan luar negeri India itu sendiri. Perdana menteri India, Narendra Modi memiliki tekad dalam menciptakan kondisi eksternal untuk memajukan sektor ekonomi domestik (Palit, 2016; Kesavan, 2020). Keberhasilan Modi dalam menunjukkan hasil nyata dari dinamika ekonomi nasional, terlihat saat melibatkan semua kekuatan besar, mempromosikan serta mengintegrasikan kembali India pada ekonomi global. Dimana India berkeinginan untuk mempromosikan kerja sama yang lebih besar dengan kawasan Asia Selatan dan memperbarui koneksi strategis di Samudra Hindia, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika.

Berkaca dari kasus COVID-19 yang membawa dunia ke titik krisis, India sebagai sebuah negara *emerging great power*, tidak membuatnya lepas dari ancaman resesi global yang juga telah menyerang banyak negara. India mencatat kasus pertama virus corona pada tanggal 30 Januari 2020 ketika seorang siswa yang baru saja kembali dari pusat pandemi di Wuhan dinyatakan positif terjangkit virus ini.

Pada hari-hari berikutnya, India memperkenalkan sejumlah tindakan pencegahan termasuk pemeriksaan termal di pelabuhan masuk dan mewajibkan para pendatang dari luar negeri untuk membagikan riwayat perjalanan mereka. Ketika kasus-kasus terus meningkat secara bertahap selama beberapa minggu berikutnya di bulan Februari, pemerintah India kemudian melarang kedatangan internasional dari negara-negara dengan tingkat infeksi yang tinggi termasuk Cina, Turki, Uni Eropa, Malaysia dan Afghanistan. Hal ini diikuti dengan larangan semua penerbangan internasional ke India selama seminggu mulai pertengahan Maret hingga pada akhirnya diberlakukan *lockdown* secara nasional oleh pemerintah India (Taneja & Bali, 2021).

Keputusan untuk memberlakukan *lockdown* ini sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, India merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memberlakukan respons nasional yang begitu tegas terhadap pandemi global. Kedua, pada bulan Maret, India memiliki jumlah kasus yang relatif kecil dibandingkan negara-negara lainnya seperti di Uni Eropa. Ketiga, *lockdown* ini diberlakukan dengan konsultasi atau peringatan yang terbatas kepada masyarakat, industri, atau bahkan lembaga pemerintah. Sementara itu, pemerintah India berargumen bahwa respons kebijakan domestiknya terhadap pandemi adalah untuk mengelola ketidakpastian yang ekstrem dengan melakukan *hedging* terhadap dampak yang merugikan. Pendekatan semacam itu, menurut pemerintah, diperlukan untuk mengelola ketidakpastian ekstrem yang terkait dengan pandemi, dan memungkinkan pemerintah memiliki basis pengetahuan untuk merancang intervensi kebijakan serta menciptakan kapasitas (Taneja & Bali, 2021).

Dampak pandemi yang dirasakan oleh India dapat dilihat melalui laporan dari Reserve Bank of India yang mengalami kontraksi sebesar 23,9% pada kuartal pertama 2020 (Udit and Nushaiba, 2020). Penurunan tersebut terjadi karena konsumsi dan investasi melambat secara signifikan akibat pandemi COVID-19. Selain

itu, sektor ekspor juga terkena dampak karena permintaan global yang menurun akibat pandemi. Kontribusi India terhadap ekspor dunia hanya menunjukkan angka yang relatif kecil, yaitu sebesar 2,2% dan jumlah itu lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Akibat resesi ini, banyak orang di India kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Dalam laporan dari Centre for Monitoring Indian Economy, tingkat pengangguran di India meningkat menjadi 7,5% pada November 2020 (Kumar, 2020). Selain itu, banyak perusahaan di India juga mengalami kesulitan keuangan dan mengurangi produksi atau bahkan berhenti beroperasi. Hal ini berdampak pada pengurangan gaji dan tunjangan karyawan. Selain itu, resesi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat India secara umum. Banyak orang yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.

Peran pemerintahan India dalam resesi COVID-19 di tahun 2020 berpusat pada pemberian stimulus ekonomi. Pada Maret 2020, pemerintah India mengumumkan paket stimulus, kurang lebih sebesar USD 23 miliar, untuk mendukung sektor-sektor yang terkena dampak pandemi. Paket stimulus ini meliputi bantuan tunai bagi penduduk yang terdampak, insentif pajak bagi sektor bisnis, serta dukungan kredit bagi sektor perbankan. Pemerintah India juga melakukan reformasi struktural dalam sektor ekonomi. Pada November 2020, pemerintah India meluncurkan skema reformasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Skema ini meliputi insentif pajak bagi perusahaan yang meningkatkan produksi dalam negeri dan dukungan infrastruktur untuk sektor industri.

Dalam meningkatkan investasi negara, pemerintah India mempercepat program infrastruktur serta berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada Februari 2021, pemerintah India mengumumkan rencana

pembangunan infrastruktur senilai Rs. 111 lakh crore (sekitar USD 1,5 triliun) untuk periode 2020-2025. Rencana ini meliputi investasi dalam sektor transportasi, energi, air, dan sanitasi. Selain itu, pemerintah India juga melakukan reformasi sektor keuangan untuk memperkuat sistem keuangan di tengah resesi ekonomi. Pada November 2020, pemerintah India mengumumkan reformasi sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat sistem keuangan (The Economic Times, 2020). Diperlukannya kewaspadaan pemerintahan India dalam mengamati kondisi politik-ekonomi dunia ke depan.

### **Upaya India dalam Penanganan Krisis Global Akibat Pandemi COVID-19**

Setelah merasakan dampak signifikan dari pandemi, India merupakan negara yang terus menekankan akan pentingnya kerja sama internasional. Hal ini dilakukan oleh India melalui bermacam cara seperti melalui hubungan bilateral (Bhattacharjee, 2021) maupun dengan cara-cara yang mendorong kerja sama melalui beragam forum seperti PBB, BRICS maupun forum lainnya di mana India menjadi anggotanya (NDTV, 2021).

India bercita-cita untuk menjadi sebuah kekuatan global yang berkontribusi pada pemerintahan global. Maka dari itu, dalam kerja sama internasional, India mencoba mendorong citra dirinya sebagai sebuah '*civilizational power*'. India telah lama menuntut suara yang lebih besar dalam urusan internasional. India dalam gambaran yang lebih besar, ingin diterima dan dipandang sebagai pembuat norma dan bukan sebagai negara yang hanya mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara lain. India berusaha untuk mengatasi dan memperolehnya melalui diplomasi vaksin atau diplomasi kesehatan. Keterlibatan sepenuh hati India dengan negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun global dalam konteks pandemi ini, dapat dilihat sebagai "pergeseran sederhana dari kedaulatan defensif ke kedaulatan yang bertanggung jawab"

(Purushothaman & Moolakkattu, 2021). India melihat adanya peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab yang berkontribusi terhadap tata kelola global.

Diplomasi COVID-19 India mengacu pada perannya sebagai produsen farmasi dunia yang memproduksi sekitar enam puluh persen dari vaksin dunia. Selain mengirimkan pengiriman parasetamol dan juga hidroklorokuin ke negara-negara SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), termasuk di dalamnya adalah Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka dan Mauritius, pada bulan Maret 2020. India juga mengirimkan pasokan ke Myanmar, Seychelles dan negara-negara Afrika lainnya. Dana Darurat SAARC sebesar 10 juta dolar AS dibentuk oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi selama pertemuan darurat virtual tingkat tinggi dengan para pemimpin SAARC (kecuali Pakistan), yang mengirimkan Menteri Kesehatan untuk menghadiri pertemuan tersebut pada bulan Maret 2020 (Chadha, 2020). Tujuan dari diplomasi COVID-19 yang gencar dilakukan oleh India ini adalah untuk menyelesaikan ketegangan dengan negara tetangga. Keberadaan pandemic ini membawa Kembali kebijakan luar negeri Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengambil kebijakan Neighborhood First untuk memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan India khususnya dengan negara-negara di sekitarnya.

Kepemimpinan India dalam mengkoordinasikan SAARC terhadap COVID-19 menuai pujian dari beberapa pemimpin dunia. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah kantor berita The New Indian Express pada bulan Mei 2020, Sekretaris Jenderal Negara-Negara Persemakmuran, Patricia Scotland mengatakan, "orang-orang menatap ke India untuk melihat bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi, pemerintah dan rakyat India menanggapi pandemi ini, mengendalikannya dan meminimalisirnya karena pandemi ini bisa saja jauh lebih buruk" (Taneja & Bali, 2021). Ia juga mengatakan

bahwa ia 'sangat terkesan' dengan cara Perdana Menteri Modi menyatukan negara-negara SAARC, termasuk beberapa anggota Negara Persemakmuran, untuk mengkoordinasikan tindakan responsif terhadap pandemi.

### **Keterlibatan India dalam Kerja Sama Internasional: BRICS, IBSA, dan IMF**

Kerjasama internasional merupakan salah satu upaya negara untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan secara bilateral, regional ataupun multilateral. Kerjasama tersebut berdiri dan berkembang untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara mandiri. Salah satu kerjasama multilateral adalah BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan sebagai negara yang dianggap sebagai *'emerging economies'* di kancah internasional. Peran dan kontribusi BRICS sangat penting bagi ekonomi dunia dalam hal populasi (40%), PDB (25% nominal dan US\$ 16,039 triliun), luas wilayah (30%), perdagangan dunia (18%), dan valuta asing global (US\$ 4 triliun) (Iqbal, 2022). Kehadiran BRICS sebagai kerjasama multilateral didorong oleh faktor ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Keterlibatan India dalam BRICS tentu didasari oleh tujuan untuk mencapai kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi. India memiliki fokus yang sangat spesifik terhadap isu pembangunan ekonomi baik di kepemimpinannya dalam BRICS atau pun G20 (Cooper & Farooq, 2016). Termasuk sikap India yang turut mendorong pembangunan Bank Sentral BRICS atau New Development Bank yang akan mendukung perekonomian dan proyek-proyek pembangunan negara-negara anggota. New Development Bank ini akan menjadi bank pembangunan multilateral yang dapat membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara BRICS. Bagi India, adanya New Development Bank akan memberikan kemudahan untuk memperoleh dana pembangunan (Delly, 2016). Lebih lanjut, New Development Bank dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara

anggotanya melalui pendanaan investasi dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi termasuk perkembangan simultan dari aktivitas bank dan pasar saham di beberapa negara berkaitan erat dengan financial development (Guru & Yadav, 2019).

BRICS mampu bergerak signifikan pada perekonomian global melalui kontribusinya terhadap GDP global yang mencapai 31,5% lebih tinggi dari kontribusi GDP global G7 yaitu 30,5%. Negara-negara BRICS menyumbang sekitar 19% dari total nilai ekspor global dan 16% dari total nilai impor global sekaligus termasuk 19% dari total investasi langsung asing yang masuk, dan jumlah yang hampir sama untuk investasi langsung asing yang keluar (Larionova, 2020). Keberhasilan BRICS dalam menyokong ekonomi dan pembangunan global menjadi bukti akan kapabilitasnya sebagai kerjasama multilateral sehingga membuat eksistensi negara-negara BRICS sendiri lebih mendapat rekognisi dalam politik internasional. Begitu halnya dengan India, dimana peningkatan dan rekognisi BRICS dalam ekonomi-politik global turut mendorong status India sebagai aktor dengan kekuatan baru yang membuat India akan lebih terlibat dalam kancah internasional. Adanya perkembangan ekonomi berimplikasi pada bagaimana eksistensi India di luar negeri, seperti India yang masuk sebagai *'Outreach group'* di forum G7 dan menjadi salah satu anggota forum G20 (Pekkanen et. al, 2021). Kemudian, presensi BRICS sebagai kerjasama multilateral yang secara signifikan mampu menyerap *foreign direct investment* (FDI) baik dalam investasi ataupun stok berbuntut pada ketertarikan perusahaan internasional ke India. Aliran masuk FDI India telah meningkat 20 kali lipat dari 2000-01 hingga 2021-22 (IBEF, 2022). Lancarnya aliran FDI ini akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional termasuk perkembangan IPTEK dan sumber daya manusia.

Lebih jauh, dalam upaya meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, India bersama Brazil dan Afrika Selatan sebagai tiga negara besar di wilayah yang berbeda membentuk

forum dialog yang digadang sebagai kerjasama Selatan-Selatan, yaitu IBSA. Secara objektif, IBSA dianggap sebagai forum yang mampu menjembatani proyek-proyek kerja sama antar tiga negara ini. IBSA menjadi wadah bagi India untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik melalui perluasan kemitraan terhadap kedua sektor tersebut. India menggunakan IBSA untuk mengukir ceruknya di kawasan Asia terutama melalui perdagangan (Ugwuja et al, 2014). Kerja sama trilateral ini juga memungkinkan India untuk memperluas pengaruhnya di arena politik global dengan memposisikan dirinya sebagai aktor kunci di antara negara-negara berkembang. Anggota IBSA percaya akan pentingnya kerja sama negara-negara selatan untuk mempromosikan pembangunan di kawasan ini, yang melegitimasi kemitraan tanpa pemberlakuan syarat atau pembentukan pola tertentu antar pihak yang bekerja sama (Silva et al, 2016). Ini mengindikasikan keterlibatan India dalam IBSA dianggap dapat mewakili kepentingan negara-negara selatan lainnya.

Meninjau keterlibatan India dalam tata kelola keuangan global seperti IMF, India memainkan peran yang esensial karena kedudukannya yang termasuk sebagai negara pendiri IMF dan salah satu negara dengan kuota terbesar. India hadir sebagai pemain penting dalam berjalannya IMF sekaligus menjadi pemimpin suara negara-negara berkembang (Srinivas, 2019). Kedudukan India dalam IMF adalah sebagai negara penerima yang mendapatkan bantuan dana ataupun nasihat keuangan saat krisis sekaligus sebagai negara kontributor yang turut berpartisipasi dalam pemberian dana bantuan terhadap negara berkembang atau negara yang sedang diterpa krisis. Seperti beberapa dekade lalu dimana India menerima pinjaman IMF untuk mengatasi masalah ekonomi terkhusus masalah *balance of payment* (BoP). Misalnya pada tahun 1981 saat India dihadapi oleh masalah *balance of payments* yang membawanya menyetujui *Extended Fund Facility (EFF) Agreement* untuk meminjam *Special Drawing Rights*

(SDR) sebesar 5 miliar dolar yang kemudian ditarik hanya 3,9 miliar dolar mengikuti BoP yang telah stabil. Di samping itu, ketika Sri Lanka diterpa oleh krisis ekonomi di tahun 2023, India bersedia untuk memberikan jaminan keuangan kepada IMF dalam mengupayakan *bailout* terhadap Sri Lanka. Secara resmi, India telah memberikan jaminan kepada IMF untuk membantu Sri Lanka mendapatkan bantuan *bailout* sebesar \$2,9 miliar (The Economic Times, 2023).

Penulis berpendapat bahwa partisipasi aktif India dalam berbagai kerja sama dan forum internasional menunjukkan prestige India sebagai kekuatan baru di politik global sekaligus menjadi upaya India dalam memposisikan kepentingannya. Kebijakan strategisnya untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak mendorong status India sebagai kekuatan baru. Dengan statusnya sebagai kekuatan baru, India akan lebih diperhitungkan di arena politik global. Sama halnya dengan partisipasi aktif India dalam forum atau kerja sama multilateral menjadi instrumen dalam menyalurkan kepentingan nasionalnya khususnya dalam menghadapi dinamika global. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu memperkuat resiliensi India dalam menghadapi resesi global 2023. Lebih lanjut, kondisi krisis ekonomi membawa pergeseran kekuatan atau tata kelola global baru sebagai respon untuk mengatasi krisis tersebut. Suatu kesempatan bagi India untuk mewujudkan manifestasi tata kelola global baru melalui adanya multilateralisme seperti BRICS atau IBSA yang sekaligus menjadi isyarat akan peran dari kekuatan baru dalam arena politik global. Kebijakan luar negeri India untuk membentuk suatu kerjasama multilateral diperlukan dalam membentuk kekuatan baru dan pengakuan.

### **Presidensi India dan *Multi-Alignment* India sebagai Mediator**

Posisi India sebagai mediator global membutuhkan pembuktian yang lebih kuat secara nyata. Dengan statusnya sebagai negara

Emerging Power, India mencoba terlibat pada forum internasional dalam upaya menjadi mediator global. Presidensi G20 pada masa ketidakpastian global saat ini dapat dimanfaatkan India untuk berkoordinasi dengan berbagai negara, baik sesama negara berkembang maupun dengan negara maju dalam membentuk tatanan global yang baru, khususnya pada masa sekarang, dimana rivalitas Barat dan Timur semakin memanas yang mendorong negara-negara untuk cenderung hanya mengambil satu sisi. Perlu bagi India untuk menunjukkan sentralitasnya dalam presidensinya pada G20 tahun ini.

Lingkungan global di mana Presidensi G20 India akan diberlangsungkan telah berubah secara substansial akibat pandemi COVID-19. Telah diamati dalam berbagai KTT sebelumnya bahwa latar belakang dari KTT G20 berkontribusi pada beberapa pada tingkat tertentu terhadap penyusunan agenda bersama dengan sejumlah faktor lainnya. Ditengah upaya global dalam menangani pandemic sekaligus perencanaan pasca pandemi, Presidensi G20 India tahun 2023 ini mengusung tema 'Vasudhaiva Kutumbakam' atau dalam terjemahan resmi inggrisnya "One Earth, One Family, One Future" yang berarti dunia sebagai satu keluarga. Tema ini menegaskan keterkaitan semua pihak dalam membentuk nilai kehidupan. Hal ini sesuai dengan preferensi politik luar negeri India yang secara pragmatis menginginkan keterkaitan dengan negara negara lain melalui manuvernya dalam forum multilateral (Ray et al, 2023). Pada G20 tahun 2023 ini, terdapat beberapa isu prioritas yang diangkat India. Kelompok kerja tahun ini akan berfokus pada bidang-bidang prioritas global seperti pembangunan hijau, pendanaan iklim, pertumbuhan inklusif, ekonomi digital, infrastruktur publik, transformasi teknologi, dan reformasi untuk pemberdayaan perempuan demi kemajuan sosio-ekonomi. Semua langkah ini diambil untuk mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. India sebagai sebuah negara yang

berkomitmen terhadap demokrasi dan kerja sama internasional, kepresidenan India akan menjadi sebuah tonggak penting karena India berusaha untuk menemukan solusi-solusi global yang praktis untuk kepentingan semua orang dan mewujudkan gagasan "Vasudhaiva Kutumbakam".

G20 yang awalnya untuk koordinasi finansial global pasca krisis finansial Asia 1997 dan kemudian semakin berperan pada resesi global 2008, kini semakin berfungsi sebagai instrumen politik global dengan upaya negara barat untuk mengeluarkan Rusia dalam dialog pada forum G20 di Bali (Hadi, 2022). Sanksi terhadap Rusia dalam bidang finansial yang mengeluarkan Rusia dari kerja sama perbankan SWIFT oleh aliansi negara-negara barat (Perez, 2022) menunjukkan bahwa sektor finansial tidak luput dari keputusan politik. Sanksi tersebut berisiko membawa dunia ke dalam fragmentasi politik global. Fragmentasi politik global tentunya tidak hanya merugikan negara-negara yang terlibat langsung, melainkan juga India yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat. Untuk mempertahankan pertumbuhan pesat ini, perlu bagi India untuk menciptakan lingkungan global yang menjadi proaktif dalam kebijakannya dalam mengelola kerja sama multilateral dengan negara-negara lainnya. Maka dari itu, tantangan ini justru harus didiskusikan dalam G20 oleh India sebagai mediator antara negara barat dan timur.

Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan India melalui forum G20 adalah dengan mengupayakan reformasi tata kelola lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF maupun bank pembangunan multilateral.

Lembaga keuangan internasional tidak memiliki sumber daya dan instrumen pembiayaan yang memadai untuk merespons tantangan yang muncul dan rintangan pembiayaan pembangunan. Perlu bagi Lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan performanya dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memastikan ketahanan ekonomi yang lebih

besar di negara-negara kurang berkembang. Basis modal lembaga keuangan internasional perlu diperkuat untuk membantu mereka memanfaatkan peningkatan modal tersebut melalui penerbitan obligasi. Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) juga harus memperluas kajian mereka pada masalah geopolitik dan geo-ekonomi yang dinamis dan mengukur dampaknya terhadap ekonomi global. Mereka harus melakukannya untuk secara khusus membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan transparansi dan menghindari 'jebakan utang' dari proyek-proyek infrastruktur besar. Mereka juga harus menangani dampak dari meningkatnya kebijakan perdagangan dan industri sepihak (T20, 2023).

Urgensi reformasi tersebut menjadi prioritas India pada Presidensi G20 2023 yang ingin memperkuat institusi keuangan global. India menilai mekanisme pengambilan keputusan saat ini kurang demokratis karena masih bertumpu pada sistem Bretton Woods di mana kekuatan voting negara ditentukan oleh nominal kontribusinya (Bhatia & Kripalani, 2022). Selain itu, reformasi juga diupayakan agar institusi keuangan yang ada tidak mendikte kedaulatan negara pengutang. India perlu merealisasikan reformasi ini menggunakan pragmatisme kerjasama multilateralisme yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan negara selatan, melainkan juga kepentingan negara utara, sehingga reformasi institusional dapat berjalan. Penting bagi India untuk dekat dengan kedua pihak, sebagai jembatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

## **KESIMPULAN**

Kebangkitan India sebagai kekuatan baru dalam politik internasional telah mendorong India dalam menempatkan kebijakan luar negeri yang strategis dan membangun lingkungan yang kondusif. Hal ini dilakukan India untuk menunjang pertumbuhannya yang pesat. Namun, dinamika global yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah memberikan ancaman yang serius bagi India untuk menjaga

laju pertumbuhan ekonomi. Pada prosesnya, dinamika global ini menggeser paradigma kebijakan luar negeri India, dari yang sebelumnya bersifat *non-alignment* menjadi multi-alignment. Praktik *multi-alignment* India berdasarkan pada kepentingan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan status internasional sebagai kekuatan baru.

Krisis global seperti krisis COVID-19 sangat menjadi momok bagi pertumbuhan India. India telah berupaya keras melalui reformasi kebijakan-kebijakan ekonomi, keuangan, dan perdagangan untuk menciptakan ketahanan nasional menghadapi resesi. India menyadari pentingnya kerja sama internasional untuk menghadapi permasalahan internasional. Salah satu upaya India tersebut adalah dengan menjalin kedekatan dengan berbagai negara melalui konsepsi multi-alignment yang berhubungan baik dengan semua pihak terlibat.

Tulisan ini telah menjelaskan bagaimana peran India dalam keanggotaan forum internasional seperti BRICS, IBSA, dan IMF. Tulisan ini melihat bahwa, peran India sebagai emerging power dalam ketiga forum tersebut memperkuat status dan relasi global India. Gagasan India dalam ketiga forum tersebut untuk mendorong adanya institusi finansial yang 'lebih ramah' terhadap negara berkembang. Dengan adanya institusi finansial yang 'ramah' terhadap negara berkembang tersebut, tentu akan memudahkan India dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Krisis akibat COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina menjadi sebuah tantangan dalam kerja sama multi-alignment India. Tantangan yang dimaksud adalah adanya tekanan eksternal agar negara menunjukkan keberpihakannya, khususnya setelah politisasi instrumen finansial seperti SWIFT. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa India secara pragmatis perlu untuk menjadi mediator global dalam menggaet pihak-pihak bertikai untuk berdialog. Forum G20 dapat menjadi pembuktian bagi India untuk melakukan itu, terlebih di tahun ini di mana India berperan sebagai presiden G20. Presidensi G20 dapat menjadi manifestasi bagi

India untuk menjadi jembatan penghubung atau mediator global dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. India juga perlu untuk secara serius mendorong reformasi dalam tata kelola keuangan dunia untuk menciptakan kerja sama dunia yang lebih solid, khususnya menghadapi resesi global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Kebijakan multi-alignment dalam hal ini menjadi penting dan perlu ditingkatkan efektivitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M., Shahbaz, M., Qazi Abro, M. M., & Ur Rehman, I. (2021). The impact of COVID-19 on economic growth: empirical evidence from the G20 countries. *Journal of Economic Structures*, 10(1), 1-18.
- Amadeo, K. (2022). The Causes and Effects of the 2008 Financial Crisis. *The Balance*. <https://www.thebalance.com/2008-financial-crisis-causes-and-effects-3305679>
- Aneja, R., & Ahuja, V. (2021). An assessment of socioeconomic impact of COVID-19 pandemic in India. *Journal of Public Affairs*, 21(2), e2266.
- Baily, M. N., Litan, R. E., & Johnson, M. (2013). *The US economy in crisis: Overview and analysis*. Brookings Institution Press.
- Bhatia, R., Kripalani, M. (2022). The Group of Twenty Today: India's Opportunity to Lead. *India Foundation Journal*, 3(6), 6-14
- Bhattacharjee, K. (2021, 4 Maret). India reiterates need for global cooperation to defeat pandemic. *The Hindu*. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023 melalui <https://www.thehindu.com/news/national/india-uk-unveil-10-year-roadmap-to-elevate-bilateral-ties-to-strategic-comprehensive-partnership/article34481201.ece>
- Blarel, N. (2012). India: the next superpower?: India's soft power: from potential to reality? *LSE IDEAS*.
- Chadha, A. (2021). India's COVID-19 Strategy and implications for its relations in the Indian Ocean. *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies*, 39(01), 82.
- Chandra, B. (2008). *India since independence*. Penguin UK.
- Cooper, A. F., & Farooq, A. B. (2016). The role of China and India in the G20 and BRICS: commonalities or competitive behaviour?. *Journal of Current Chinese Affairs*, 45(3), 73-106.
- da Silva, A. L. R., Spohr, A. P., & da Silveira, I. L. (2016). From Bandung to Brasilia: IBSA and the political lineage of South-South cooperation. *South African Journal of International Affairs*, 23(2), 167-184.
- Delly, T. R., & Pahlawan, I. (2016). Kepentingan Ekonomi Politik India Dalam Membentuk Kerjasama Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1-13.
- Dharmaputra, R. (2020). Laid-Back Approach and Strategic Deception: Russia's Dual Strategy in Responding to the COVID-19 Pandemic. *Global Strategis*, 14(2), 373-388. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.373-388>
- Federal Reserve System. (2003). What is a recession? [https://www.federalreserve.gov/faqs/economy\\_14419.htm](https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14419.htm)
- Fonseca, P. C. D., Paes, L. D. O., & Cunha, A. M. (2016). The concept of emerging power in international politics and economy. *Brazilian Journal of Political Economy*, 36, 46-69.
- Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of COVID-19 on educational institution in India. *Purakala Journal U (CARE Listed)*, 31(21).
- Guru, B. K., & Yadav, I. S. (2019). Financial development and economic growth: panel evidence from BRICS. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 24(47), 113-126.
- Hadi, M.S. (2022, 11 November). Putin Skips G20 Summit to Avoid Confrontation with US and It's Allies. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/english/2022/11/11/putin-skips-g20-summit-to-avoid-confrontation-with-us-and-its-allies>
- Hall, I. (2016). Multialignment and Indian foreign policy under Narendra Modi. *The Round Table*, 105(3), 271-286. <https://doi.org/10.1080/00358533.2016.1180760>
- Hall, I. (2016). Multialignment and Indian foreign policy under Narendra Modi. *The Round Table*, 105(3), 271-286.
- IBEF. (2022). Foreign direct investment. Retrieved from <https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment>

- Imbs, J. (2010). The first global recession in decades. *IMF economic review*, 58(2), 327-354.
- Iqbal, B. A. (2022). BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 14(1), 7-8.
- Jaffrelot, C., & Singh Sidhu, W. P. (2013). From Plurilateralism to Multilateralism? G20, IBSA, BRICS, and BASIC. In Sidhu, W. P. S., Mehta, P. B., & Jones, B. D. (Eds.). *Shaping the emerging world: India and the multilateral order*. Brookings Institution Press. 319–340
- Jaiswal, K. K., & Dubey, K. K. (2021). Impact of the global financial crisis on the Indian economy. *International Journal of Accounting, Business and Finance*, 1(1), 15-2
- Jaipuria, S., Parida, R., & Ray, P. (2021). The impact of COVID-19 on tourism sector in India. *Tourism Recreation Research*, 46(2), 245-260.
- James, H. (2011). International order after the financial crisis. *International Affairs*, 87(3), 525-537. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2011.00988.x>
- Jena, P. K. (2020). Impact of Covid-19 on higher education in India. *International Journal of Advanced Education and Research (IJAER)*, 5.
- Jessop, B. (2012). Narratives of Crisis and Crisis Response: Perspectives from North and South. In: Utting, P., Razavi, S., Buchholz, R.V. (eds) *The Global Crisis and Transformative Social Change*. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, London. [https://doi.org/10.1057/9781137002501\\_2](https://doi.org/10.1057/9781137002501_2)
- Kesavan, K. V. (2020). India's 'Act East' policy and regional cooperation. In Kesavan et al *India and South Korea: Exploring New Avenues, Outlining Goals*. ORF Special Report. 7-16
- Kumar, C. (2020, 1 Mei). Unemployment rate rises to 7.5% during Sept-Dec; high among educated youth: CMIE. *Business Today*, Diakses pada tanggal 19 April 2023 melalui <https://www.businesstoday.in/jobs/story/unemployment-rate-rises-75-during-sept-dec-high-among-educated-youth-cmie-242250-2020-01-20>
- Kumar, S., Maheshwari, V., Prabhu, J., Prasanna, M., Jayalakshmi, P., Suganya, P., Malar., B.A., & Jothikumar, R. (2020). Social economic impact of COVID-19 outbreak in India. *International Journal of Pervasive Computing and Communications*, 16(4), 309-319. <https://doi.org/10.1108/IJPCC-06-2020-0053>
- Kurniawan, A. (2022, 25 Maret). Perang Rusia Ukraina Telah Berubah Menjadi Bencana Ekonomi Bagi India. *Sindo News*. Diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/723115/33/perang-rusia-ukraina-telah-berubah-menjadi-bencana-ekonomi-bagi-india-1648163000/10>
- Larionova, M. (2020). Role of BRICS in the Global Economy. *BRICS Informationportal*, June, 4.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 9th Edition. Pearson Education Limited. Pp. 16
- Mayangsari, F. R. (2020). Australia Government Response to COVID-19: Coordination and the Effectivity of Policy. *Global Strategis*, 14(2), 279– 296. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.279-296>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mohammed, N. (2022). The Russia-Ukraine War Crisis-It's Impact on Indian Economy. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*.
- Mongelli, F. P., & Camba-Mendez, G. (2018). The Financial Crisis and Policy Responses in Europe (2007–2018). *Comparative Economic Studies*, 60, 531-558.
- Naudé, W. (2009). *The financial crisis of 2008 and the developing countries* (No. 2009/01). WIDER Discussion Paper.
- NDTV. (2021, 14 April). India Leading in Global Cooperation in Handling Covid Pandemic: Foreign Secretary. Diakses pada 6 Mei 2023 melalui <https://www.ndtv.com/india-news/india-leading-in-global-cooperation-in-handling-covid-19-pandemic-foreign-secretary-harsh-varadhan-shringla-2413599>
- OECD. (2021). The economic impact of coronavirus (COVID-19) on OECD countries. Diakses pada 17 April 2023 melalui

- [https://doi.org/10.1080/14799855.2015.1005737](https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses/Pardesi, M. S. (2015). Is India a great power? Understanding great power status in contemporary international relations. <i>Asian Security</i>, 11(1), 1-30. <a href=)
- Palit, A. (2016). India's Act East policy and implications for Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, 81-92.
- Pekkanen, S. M., John Ravenhill, R. F., & Baihaqi, I. (2021). Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India Baru: Handbook Hubungan Internasional ASIA. Nusamedia.
- Perez, C. (2022, 3 Maret). What Does Russia's Removal From SWIFT Mean For the Future of Global Commerce? *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2022/03/08/swift-sanctions-ukraine-russia-nato-putin-war-global-finance/>
- Perwej, A. (2020). The impact of pandemic COVID-19 on the Indian Banking System. *International Journal of Recent Scientific Research*, 11(10), 39873-39883.
- Peters, B. G. (2021). Governing in a time of global crises: the good, the bad, and the merely normal. *Global Public Policy and Governance*, 1, 4-19. <https://doi.org/10.1007/s43508-021-00006-x>
- Pratiwi, F. I., & Salamah, L. (2020). Italy on COVID-19: Response and Strategy. *Global Strategis*, 14(2), 389-402. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.389-402>
- Priangani, A. (2015). Perkembangan Brics (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Dalam Kancah Ekonomi Politik Global. *Jurnal Kebangsaan*, 4(7), 103254.
- Purushothaman, U., & Moolakkattu, J. S. (2021). The politics of the COVID-19 pandemic in India. *Social Sciences*, 10(10), 381.
- Puspitasari, I. (2020). Ethiopia and Health Diplomacy during the COVID-19 Pandemic. *Global Strategis*, 14(2), 437-450. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.437-450>
- Ray, S., Jain, S., Thakur, V., & Miglani, S. (2023). Global Cooperation and G20: Role of Finance Track.
- Santoso, Y. W. (2020). Deliberate Negligence: Bolsonaro and Brazil's Failure in Response to COVID-19 Pandemic. *Global Strategis*, 14(2), 315-330.
- <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.315-330>
- Sharma, A. K., & Rai, S. K. (2023). Understanding the Impact of Covid-19 on MSMEs in India: Lessons for Resilient and Sustained Growth of Small Firms. *Journal of Small Business Strategy*, 33(1), 70-83.
- Srinivas, V. (2019). India's relations with the International Monetary Fund (IMF): 25 years in perspective 1991-2016. Vij Books India.
- Stephen, M. D. (2017). Emerging powers and emerging trends in global governance. *Global governance*, 483-502
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Susanto, S. R. (2020). Germany's Strategy in Handling COVID-19: The Role of National Leadership Strength and The Maximization of Welfare State Continental System Support. *Global Strategis*, 14(2), 403-420. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.403-420>
- Szczepanski, M. (2019). A decade on from the crisis Main responses and remaining challenges EPRS| European Parliamentary Research Service. Retrieved from <https://policycommons.net/artifacts/1337646/a-decade-on-from-the-crisis/1945604/>
- T20 India. (2023). Reorienting IFIs for Meeting Emerging Development Financing Challenges. G20 India 2023. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 melalui [https://t20ind.org/research/reorienting-ifis-for-meeting-emerging-development-financing-challenges/#\\_ednref14](https://t20ind.org/research/reorienting-ifis-for-meeting-emerging-development-financing-challenges/#_ednref14)
- The Economic Times. (2023). India assures IMF; Sri Lanka close to securing \$2.9 billion bailout. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-assures-imf-sri-lanka-close-to-securing-2-9-billion-bailout/articleshow/97148255.cms?from=mdr>
- Tomczak, K. (2023). Transmission of the 2007-2008 financial crisis in advanced countries of the European Union. *Bulletin of Economic Research*, 75(1), 40-64.
- Udit, M., & Nushaiba, I. (2020, 1 September). India GDP growth contracts 23,9%: What is the economics behind the math? *The Indian Express*. Diakses pada tanggal 2 Mei 2023 melalui <https://indianexpress.com/article/explained/>

- gdp-contraction-23-9-the-economics-behind-the-math-6578046/  
Ugwujaja, A. A., Ubaku, K. C., Obiakor, N. J., & Ibekilo, B. (2014). South-South Cooperation and the prospects of a new international economic order: An insight into the India Brazil-South Africa (IBSA) dialogue forum. *International Journal of Humanities, Social Science and Education*, 1(8), 171-182.
- Zaring, D. (2010). International Institutional Performance in Crisis. *Chicago Journal of International Law*, 10(2), 6.

### **BIOGRAFI**

**Yosua Saut Marulitua Gultom** merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan minat pada Teori Hubungan Internasional, Ekonomi Politik Internasional, Global Governance dan Dunia Selatan.

**Finsy Aurelia Putri Kinanti** merupakan mahasiswa aktif S1 program studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memiliki minat pada, Politik Environmentalism Internasional, Diplomasi Publik dan Hukum Internasional.

**Syifa Aprilia Putri** merupakan mahasiswa aktif program studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang memiliki ketertarikan dalam Ekonomi-Politik Internasional, Keamanan Maritim dan Pembangunan Manusia.